

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Satwa lindung adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, hal itu tercantum dalam Undang – undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Menurut Alikodra (1990) satwa lindung dapat diartikan binatang yang hidup liar di alam bebas tanpa campur tangan manusia.<sup>1</sup> Dalam ekosistem alam, satwa lindung memiliki peranan yang sangat banyak dan penting, salah satunya adalah untuk melestarikan hutan.

Satwa lindung adalah salah satu bagian dari keanekaragaman hayati juga tak luput dari ancaman manusia. Satwa lindung diambil dari habitatnya untuk beberapa alasan. Ada orang yang mengambil satwa lindung untuk diperdagangkan baik secara nasional maupun internasional karena nilai ekonomisnya yang sangat tinggi. Sebagian lagi orang mengambil satwa liar untuk memenuhi kesenangan atau hobbynya. Ada pula orang yang mengambil satwa liar dari habitatnya untuk keperluan obat-obatan atau pesanan orang.

Untuk melindungi satwa lindung dari eksploitasi manusia sebagaimana digambarkan diatas, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) *World Charter For*

---

<sup>1</sup> Alikodra, H.S. 1990. *Pengelolaan Habitat Satwa Liar*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

*Nature* dikeluarkan oleh *the United Nations General Assembly* pada tanggal 28 Oktober 1982. Charter ini berisi prinsip-prinsip konservasi yang harus diterapkan oleh negara terhadap setiap kegiatan manusia yang mempengaruhi alam dengan suatu pedoman umum yakni bahwa setiap bentuk kehidupan adalah unik karenanya dia membutuhkan jaminan penghormatan terlepas apakah dia berharga pada manusia atau tidak. Pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menindak lanjuti *World Charter For Nature*. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia cukup progresif karena dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 4 Tahun 1982, Pemerintah diberi mandat untuk membuat undang-undang untuk melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Disamping *World Charter For Nature*, PBB juga telah mengeluarkan *Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora* atau sering disingkat dengan CITES dikeluarkan pada tanggal 3 Maret 1973 dan mulai berlaku tanggal 1 Juli 1975. Konvensi ini dirancang untuk melindungi spesies flora dan fauna langka dari eksploitasi yang berlebihan dengan mengatur atau melarang perdagangan internasionalnya dan mengurangi nilai Terakhir, PBB mengesahkan *Convention on Biological Diversity* (CBD) pada tanggal 5 Juni 1992 dan mulai berlaku 29 Desember 1993. CBD mendapat pujian dari banyak ahli hukum lingkungan internasional karena ini merupakan konvensi internasional yang pertama

yang mengatur seluruh aspek keanekaragaman hayati dan dia melebihi target CITES untuk melindungi keanekaragaman hayati.

Tujuan CBD adalah untuk mengkonservasi keanekaragaman hayati, mengatur pemakaiannya komponennya secara berkesinambungan dan menentukan pembagian manfaat yang adil dan seimbang dari pemanfaatan sumberdaya genetika.

Di wilayah hukum Desa Manis Mata Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, berdasarkan pengamatan penulis selama ini banyak ditemukan masyarakat yang memelihara secara ilegal satwa yang dilindungi. Hal itu dilakukan dengan berbagai macam cara diantaranya dengan memasang perangkap untuk menjebak hewan yang akan dibidiknya kemudian mereka menangkap hewan tersebut. Sebagian besar hewan yang ditangkap adalah sejenis orang hutan, rusa, dan kukang. Sudah diketahui bahwa pemeliharaan satwa lindung secara ilegal adalah suatu perbuatan tindak pidana, hal itu tercantum dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya yang berbunyi :

“Setiap orang melarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Simpan, memiliki, merawat mengangkut, dan memperniagakan satwa satwa dalam keadaan mati;

- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari tempat di indonesia ketempat lain di dalam atau diluar indonesia;
- d. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau benda barang yang di buat dari bagian-bagian ini atau dikeluarkannya dari tempat di indonesia ketempat lain di dalam atau diluar indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan / atau sarang satwa yang dilindungi, ”sanksi untuk orang yang sengaja melakukan perbuatan terhadap ketentuan pasal 21 ayat (2) adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (juta) (pasal 40 UU 5/1990).”

“Ada diperuntukan bagi penangkapan satwa yang dilindungi itu yaitu hanya dapat diperlakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau menyelamatkan jenis tumbuhan atau satwa yang bersangkutan.selain itu, batasan dari pelestarian satwa yang dapat pula yang dilakukan karena hal oleh salah satu sebab satwa yang dilindungi mahluk hidup manusia. Membahayakan disini berarti tidak hanya untuk jiwa manusia pelaut juga menimbulkan gangguan atau keresahan atau ketentraman hidup manusia, atau kerugian materi seperti rusaknya lahan atau tanaman hasil pertanian.”<sup>2</sup>

Melihat rujukan pasal dalam undang-undang tersebut, maka perbuatan yang dilakuan masyarakat diwilayah hukum Desa Manismata Kecamatan Manismata Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat merupakan sebuah

---

<sup>2</sup> Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

perbuatan tindak pidana yang pasti memerlukan pertanggung jawaban atas kesalahannya tersebut. Tindak pidana tersebut sudah dilakukan secara terus menerus bahkan menjadi kebiasaan masyarakat Desa Manis Mata Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan pengamatan dengan judul “Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Ketentuan Pidana dalam Pemeliharaan Satwa Lindung Ilegal (Studi Pelaksanaan Pasal 21 jo Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam di Desa Manis Mata Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat)”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pemelihara satwa lindung ilegal di Desa Manis Mata Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terkait pemeliharaan satwa lindung ilegal di Desa Manis Mata Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat ?

#### **C. Batasan Masalah**

Pada dasarnya permasalahan dalam pemeliharaan satwa lindung ini cukup luas, tetapi agar sesuai dengan yang telah di rencanakan sebelumnya

diperlukan batasan-batasan agar tujuan penelitian tugas akhir ini dapat tercapai. Adapun batasan-batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Satwa lindung yang dimaksud dalam penelitian tugas akhir ini adalah jenis satwa Orang utan (*Pongo*)
2. Satwa Lindung yang di maksud dalam penelitian tugas akhir ini adalah jenis satwa Kukang (*Nycticebus*)
3. Satwa Lindung yang di maksud dalam penelitian tugas akhir ini adalah jenis satwa Rusa (*Cervus Unicolor Equinus*)

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan yang melandasi penulisan ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pemelihara satwa lindung ilegal di Desa Manis Mata Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terkait pemeliharaan satwa lindung secara ilegal di Desa Manis Mata Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Atas dasar maksud, tujuan, dan alasan sebagaimana yang penulis uraikan diatas maka dengan ini penulis mempunyai harapan ke depannya nanti akan memiliki manfaat sebagaimana berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan kelompok hukum pidana dan penelitian lebih lanjut terhadap penegakan hukum terkait dengan adanya fenomena pemeliharaan secara ilegal satwa yang dilindungi di kalangan masyarakat khususnya masyarakat Manis Mata Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Penulis

Sebagai wawasan dan pengetahuan maupun wacana keilmuan tentang penegakan hukum terkait adanya pemeliharaan satwa yang dilindungi secara ilegal di kalangan masyarakat. Selain itu juga, sebagai salah satu syarat untuk menyandang gelar kesarjanaan S1 (Strata Satu) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

### b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan penambahan pengetahuan bagi masyarakat khususnya untuk masalah pemeliharaan satwa yang dilindungi secara ilegal. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas tindak pidana pemeliharaan satwa liar.

### c) Bagi Kepolisian

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dalam rangka meningkatkan peran serta Polri dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemeliharaan secara ilegal satwa yang dilindungi.

### 3. Manfaat Akademis

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, di harapkan ke depannya nanti akan membawa kemanfaatan akademis dengan memberikan wawasan atau pandangan baru yang berguna bagi pengembangan dan penelitian secara lebih lanjut terhadap ilmu hukum, sehingga kedepannya nanti akan menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan berguna untuk masa yang akan datang. Selain itu dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

## **F. Kegunaan Penelitian**

### 1. Bagi Penulis

Selain untuk melakukan penelitian dan sebagai syarat untuk menjadi Sarjana Hukum, harapan penulis melalui penelitian ini ada bahan tambahan pengetahuan dan wawasan baru untuk mengurangi masalah tindak pidana pemeliharaan secara ilegal terhadap satwa yang dilindungi. Karena dengan berkembangnya dunia yang semakin modern apabila tidak di iringi dengan kepedulian masyarakat akan masalah kejahatan maka akan sulit untuk di berantas.

### 2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada dunia ilmu pengetahuan sehubungan dengan bidang hokum pidana, terutama terkait dengan kasus yang diteliti.

### 3. Bagi Kalangan Praktisi Hukum



Dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai praktek hukum serta peraturan yang perlu diaplikasikan dalam mengatasi kasus yang diteliti, yaitu dalam hal ini pertanggung jawaban pidana terhadap pemeliharaan satwa liar yang dilindungi secara ilegal.

## **G. Metode Penulisan**

Untuk mendapatkan keterangan atau data-data yang diperlukan dalam penelitian guna menyusun skripsi ini, dimana keterangan-keterangan tersebut digunakan untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang telah penulis rumuskan di atas, maka dipergunakan metode penulisan sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Penulis berkeinginan untuk mencoba lebih mendalami tentang Tinjauan Yuridis Sosiologis Pelaksanaan Ketentuan Pidana dalam Pemeliharaan Satwa Lindung Ilegal (Studi Pelaksanaan Pasal 21 jo Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam di Desa Manis Mata Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat). Metode ilmu hukum yang khususnya adalah yuridis sosiologis (*Social legal a roach*) adalah suatu pemaparan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum yang terjadi di lapangan apakah sesuai dengan apa yang sudah di atur dalam undang-undang republik indonesia dan

apakan sudah ditegakan seperti apa yang dicita-citakan oleh undang-undang terutama masalah tentang tindakan hukum aparat penegakan hukum dan juga kesadaran masyarakat. Agar kedepannya tercipta suasana tertib akan hukum yang berlaku.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat tiga jenis data yang menjadi acuan penulis dalam mengerjakan penelitian ini :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang asli di peroleh dari lokasi penelitian yang masih asli tanpa ada sentuhan apapun baik dari segi wawancara, gerak tubuh, dokumen tertulis, pendapat dan informasi lainnya yang mendukung selama proses penelitian. Dalam hal data primer ini informasi yang di peroleh dari lokasi penelitian Desa Manis Mata Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan wawancara atau *interview* serta pendapat yang diperoleh dari sumber informasi utama / pertama dan dokumen-dokumen resmi yang mana semuanya diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu di kantor Kepolisian Sektor Manis Mata dan di Desa Manis Mata Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat .

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari dokumen tertulis, file, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain yang di peroleh

darisumber kedua (buku,jurnal,hasil penelitian terdahulu,dan lain-lain).wujud dari data sekunder ini adalah bentuk laporan dari hasil penelitian yang sudah diolah dengan berbagai materi yang mendukung selama penelitian. Dalam hal ini penelitian menyiapkan *literature* yang berupa peraturan perundang-undangan yang tentunya berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan dokumen yang diperoleh dari Kantor Kepolisian Sektor Manis Mata Kalimantan Barat dan Desa Manis Mata Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan penelitian lapangan berdasarkan fakta yang ada tanpa di buat-buat melalui beberapa kegiatan pengumpulan data yang berupa Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi, yang dijelaskan sebagaimana berikut :

#### a. Observasi

Observasi adalah sebuah cara pengumpulan data yang diperoleh oleh penulis selama melakukan penelitian di lokasi penelitian yang berdasarkan fakta yang ada, namun dalam hal ini penulis tidak di anjurkan untuk ikut campur langsung ke obyek penelitian melainkan hanya untuk mengamati guna mendapatkan informasi maupun data yang akurat tentang Tinjauan Yuridis Sosiologis Pertanggungjawaban

Pidana Terhadap Pemelihara Satwa Lindung (Studi Kasus Desa Manis Mata Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat).

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah sebuah cara pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan sesi tanya jawab dengan salah satu objek penelitian (*interviewer*) mengenai kajian objek yang sedang dilakukan penelitian untuk memperoleh informasi dari informan sasaran tersebut. Dalam hal ini dilakukan secara langsung kepada Bapak Ijul selaku pemelihara satwa lindung, IPTU Suhandi selaku Kepala Kepolisian Sektor Manis Mata, Ir. Ina Kartini selaku Kabid Humas BKSDA Kalimantan Barat, dan Drh. Adi Irawan selaku Manajer Operasional IAR Indonesia di Desa Manis Mata Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui data-data lain yang mendukung akan penelitian ini, yaitu berupa dokumen-dokumen maupun peristiwa yang telah terjadi sebelumnya dan tentunya masih dalam lingkup bahan yang dibutuhkan untuk penelitian.

4. Analisa Data

Dari hasil penelitian yang sudah terkumpul seperti yang diperoleh dari lapangan dan data kepustakaaan, selanjutnya penulis menganalisa data

tersebut secara deskriptif kualitatif yakni mengungkapkan data berupa fakta, keadaan, fenomena, dan variabel yang terjadi saat penelitian berjalan dengan menafsirkan, menuturkan, dan menganalisa data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi sehingga diperoleh sesuai kesimpulan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan hukum ini penulis membagi dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bagian di jabarkan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, yakni memuat landasan yang bersifat ideal antara *das sollen* dan *das sein* yang melatar belakangi suatu masalah yang hendak dikaji lebih mendalam. Latar belakang yang telah dibuat tersebut menghasilkan suatu rumusan masalah yang akan diangkat dan dibahas. Adapun selanjutnya tersebut tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan, metode penulisan dan sistematika penulisan untuk mempermudah penyusunan penelitian hukum ini.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini diperoleh dari studi kepustakaan dan digunakan sebagai kerangka untuk memudahkan penulisan penelitian.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan memaparkan apa yang menjadi pokok bahasan sebagai obyek kaitan dalam penelitian berdasarkan masalah yang telah dirumuskan dari obyek penelitian yang kemudian akan dilakukan analisa.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisikan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti oleh penulis serta saran penulis yang perlu disampaikan terkait dengan masalah tersebut yang diangkat.

